



Sosialisasi Jampersal Hingga Tingkat RT/RW

YOGYAKARTA — Program jaminan persalinan (Jampersal) yang segera diterapkan di Kota Yogyakarta, bakal disosialisasikan pelaksanaan maupun mekanismenya hingga ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Sosialisasi menjadi bagian penting dari suksesnya pelaksanaan program nasional ini.

“Kami sedang menyusun agenda sosialisasi terkait mekanisme Jampersal ke Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, dan jika memungkinkan akan diteruskan hingga ke rukun tetangga dan rukun warga (RT/ RW),” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati, Rabu (20/7).

Menurut dia, sejumlah materi yang diberikan dalam sosialisasi program Jampersal di antaranya menyangkut syarat yang harus dipenuhi masyarakat saat ingin memanfaatkan jaminan itu. Ia menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Di antaranya memiliki buku kesehatan ibu dan anak (KIA) yang bakal diperoleh apabila warga melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di Puskesmas. “Jika tidak punya KIA, maka kami sudah menyiapkan surat bukti pelayanan sebagai penggantinya,”

jelas dia.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Emmanuel Ardi Prasetya meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan sosialisasi program nasional Jampersal, sehingga seluruh warga masyarakat mengetahuinya.

“Sosialisasi mencakup semua mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan warga apabila ingin memanfaatkan program ini,” paparnya, seperti diberitakan *Antara*.

Dia mengamati, masih banyak warga yang belum mengetahui secara detil terkait mekanisme yang harus dilakukan agar bisa memanfaatkan Jampersal.

Jaminan ini, kata dia, sudah dapat dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta, setelah keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2011 terkait pengurangan retribusi persalinan di Puskesmas.

Dengan peraturan wali kota itu, maka Puskesmas diharapkan tidak ragu lagi dalam memberikan pelayanan Jampersal kepada masyarakat. “Peraturan wali kota ini juga akan memudahkan Puskesmas saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tandasnya lagi.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005